

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi, *Bahan Materi Kuliah "Pendekatan "Restorative justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"*, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Syafaat Rachmad, *Dagang Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Thomas Sunaryo, *Buku Modul Mata Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan: Penologi*, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dr. Carolina, S.H.,M.H. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Mahkamah Agung RI, Rakornas TPPO, Jakarta, 15 Oktober 2019.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Raimond Flora Lamandasa, *penegakan hukum*, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

JURNAL

- Andres Lucky Lukwira, *Restitusi sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana*. Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.
- Hasil wawancara dengan pihak LPSK Ibu Lisa dan Bapak Steve. Jakarta: 17 Januari 2022, pukul 09.18 WIB.

- Laporan Tahunan LPSK 2020. LPSK Menolak Menyerah, Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi.
- M. Chaerul Risal, *Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14
- Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 21 Oktober 2021.
- Rahman Astriani, *Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Sondang Kristine, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK atas nama Fitriyani binti Muradi)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219.
- Zulkifli, *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Pedoman Kejaksaan No. 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Surat Edaran Jampidum Nomor B-3178/E/Ejp/11/2012 tanggal 28 November 2012.

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d4e864133c4/banyak-alasan-pelaku-tak-bayar-restitusi> "Banyak Alasan Pelaku Tak Bayar Restitusi" MYS 11 September 2016 diakses 2 Oktober 2021 pukul 21.45 wita.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia?page=3>, diakses pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 12.14 wita.

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, diakses pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 pukul 12.15 wib.